



**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

(Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo  
Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)

***THE ROLE OF RURAL-OWNED CORPORATION IN EMPOWERMENT  
RURAL PEOPLE***

*(A Case Study of Almadina Rural-Owned Corporation in Temurejo Village  
Bangorejo Subdistrict Banyuwangi)*

**SKRIPSI**

Oleh  
Singgih Tri Atmojo  
NIM 100910301027

**ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**



**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

(Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo  
Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)

***THE ROLE OF RURAL-OWNED CORPORATION IN EMPOWERMENT  
RURAL PEOPLE***

*(A Case Study of Almadina Rural-Owned Corporation in Temurejo Village  
Bangorejo Subdistrict Banyuwangi)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh  
Singgih Tri Atmojo  
NIM 100910301027

**ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**

**PERSEMBAHAN**

1. Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, saya mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya, Abah Edy Hariono (alm) dan Umiku Siti Musanadah yang tercinta, yang telah memberikan curahan kasih sayang dan bimbingan doa demi keberhasilanku, serta dukungan atas setiap langkahku untuk menjadi pribadi yang berilmu dan berbudi, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Kakak-kakak kandungku Kamalia Hasanah, Anisah Khoiriyah dan Busairi.
3. Teman-teman Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTTO**

“Siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya dan pahala yang mulia baginya.” (Terjemahan Surat Ar-QS Al Hadiid [57] : 11)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia. 2000. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Singgih Tri Atmojo  
**NIM** : 100910301027  
**Jurusan** : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkannya sumber dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan hasil karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 17 September 2015

Yang menyatakan,

**Singgih Tri Atmojo**

**NIM 100910301027**

**SKRIPSI**

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

(Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo  
Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)

***THE ROLE OF RURAL-OWNED CORPORATION IN EMPOWERMENT  
RURAL PEOPLE***

*(A Case Study of Almadina Rural-Owned Corporation in Temurejo Village  
Bangorejo Subdistrict Banyuwangi)*

**Oleh**

**Singgih Tri Atmojo**

**NIM 100910301027**

**Pembimbing :**

**Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si**

**NIP 197001031998021001**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 17 September 2015  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

**Tim penguji**

Ketua,

Drs. Syeh Hariyono, M.Si  
NIP. 195904151989021001

Sekretaris,

Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si  
NIP. 197001031998021001

Anggota I,

Dr. Nur Dyah Gianawati, MA.  
NIP. 195806091985032003

Anggota II,

Belgis H Nufus, S.Sos., M.Kesos  
NRP. 760014661

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA  
NIP. 195207271981031003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada umat di seluruh penjuru jagad raya. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)”**.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak atas segala bantuan, kerjasama, dan kontribusi pemikiran yang diberikan. Penghargaan serta rasa terimakasih penulis sampaikan setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Nur Dyah Gianawati, MA selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Arief, S.Sos M. AP selaku Dosen Pembimbing Akademik
4. Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing atas segala ilmu, motivasi, nasehat dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.



6. Kedua orang tuaku Edy Hariyono (alm) dan Siti Musanadah yang telah memberikan motivasi, kesabaran, pengorbanan tanpa batas dan selalu memberikan untaian doa untuk anak-anaknya.
7. Terima kasih untuk kakak-kakak kandungku Kamalia Hasanah, Anisah Khoiriyah dan Busairi selalu memberikan keceriaan, warna dalam hidupku serta inspirasiku.
8. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku, Ilham, Vina, Opan, Roni, Syifaudin, Mardit, Subaidi, Yudha, Rhadit, Dedi, Fella, Yessi, Banun, Chiki, Devi, Prima, Novi, Yessi, Ady dan seluruh teman-teman di Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya angkatan 2010, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember yang telah memberikan banyak arahan dalam setiap diskusi.

Sebagai manusia yang sarat keterbatasan, penulis tentunya menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Harapan yang tiada henti diinginkan penulis adalah adanya kritik dan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan

Jember, 17 September 2015

Penulis

## RINGKASAN

“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)”, Singgih Tri Atmojo, 100910301027, 94 Halaman, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

BUMDes yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan berusaha mengetahui dan merumuskan permasalahan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi?”

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan tehnik *purposive sampling* untuk informan pokok dan metode *Snowball Sampling* untuk informan tambahan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis, dalam menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Kesimpulannya Peran Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tujuan profit atau hasil akhirnya yang di maksud sisa hasil usaha disini nantinya dibagi untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat yang tidak mampu (janda dan anak yatim). BUMDes bukan hanya sebagai bentuk lembaga sosial saja tapi menjadi lembaga ekonomi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat (anggota). Peran yang dilakukan oleh relawan sosial (pekerja sosial) yaitu peran sebagai pemercepat perubahan (*enabler*), peran sebagai perantara (*broker*), peran sebagai pendidik (*educator*), peran sebagai tenaga ahli (*expert*), peran sebagai perencana sosial (*social planner*).

Peranan-peranan pemberdayaan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah yang memerlukan bantuan modal usaha agar bisa memiliki usaha sendiri dengan begitu mereka bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidupnya. Peran pengurus BUMDes Al Madina memberikan pemberdayaan kepada seluruh anggotanya mulai dari tahapan persiapan, tahapan *assessment* (penilaian), tahapan perencanaan alternatif program/kegiatan, tahapan pemformulasian program, tahapan pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap terminasi. Pada tahapan-tahapan tersebut masyarakat dilibatkan secara langsung yaitu supaya masyarakat mengerti akan masalah yang dihadapi serta dapat mengentaskan permasalahan mereka sendiri sampai mereka mandiri. Selanjutnya dalam program pemberdayaan BUMDes membentuk program bersama dengan para anggotanya, dalam hal ini pengurus, anggota dan masyarakat sudah berperan aktif dalam seluruh kegiatan pemberdayaan tersebut serta dapat memberikan solusi dan masukan bagi keperluan/ kebutuhan mereka sendiri.

Upaya Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa yaitu memiliki beberapa program untuk anggota-anggotanya, yaitu antara lain:

1. Simpan Pinjam/Permodalan, permodalan simpan ini didapat dari uang kas yang di kumpulan dari separuh penghasilan dari para anggotanya yang telah meminjam modal ataupun yang telah menyewa tanah lawan sawah jeruk. Uang kas ini akan berputar untuk dijadikan simpan pinjam bagi masyarakat

yang telah menjadi anggota BUMDes Al Madina, bagi anggota baru yang akan meminjam modal dan bagi anggota lama yang ingin menambah modal.

2. Persewaan tanaman jeruk dan penanaman buah naga, program ini yaitu membuka persewaan jeruk kepada anggotanya yang ingin menjadi petani jeruk dan pedagang jeruk. Sewa lahan dan sewa tanaman jeruk ini semuanya dari BUMDes jadi mereka/anggota yang menyewa bagi hasil dengan BUMDes. Hasil yang didapat oleh BUMDes dari anggotanya yang menyewa dimasukkan ke dalam kas untuk dijadikan modal pembelian lahan lagi dan lahan tersebut juga akan digunakan untuk persewaan bagi anggota barunya, dan juga sebagai tambahan peminjaman modal.
3. Peternakan hewan, program ini seperti yang dilakukan oleh masyarakat desa bila ada yang mau merawat dan memberi makan kepada ternak orang maka nanti hasilnya jika ternak tersebut beranak maka orang yang merawatnya akan mendapatkan imbalan anak ternak tersebut. Ternak disini di sediakan oleh BUMDes Al Madina, jadi BUMDes Al Madina memberikan dan mempercayakan kepada anggotanya untuk merawat ternak tersebut.

**Kata Kunci :** Peran, Pemberdayaan, dan BUMDes

**DAFTAR ISI**

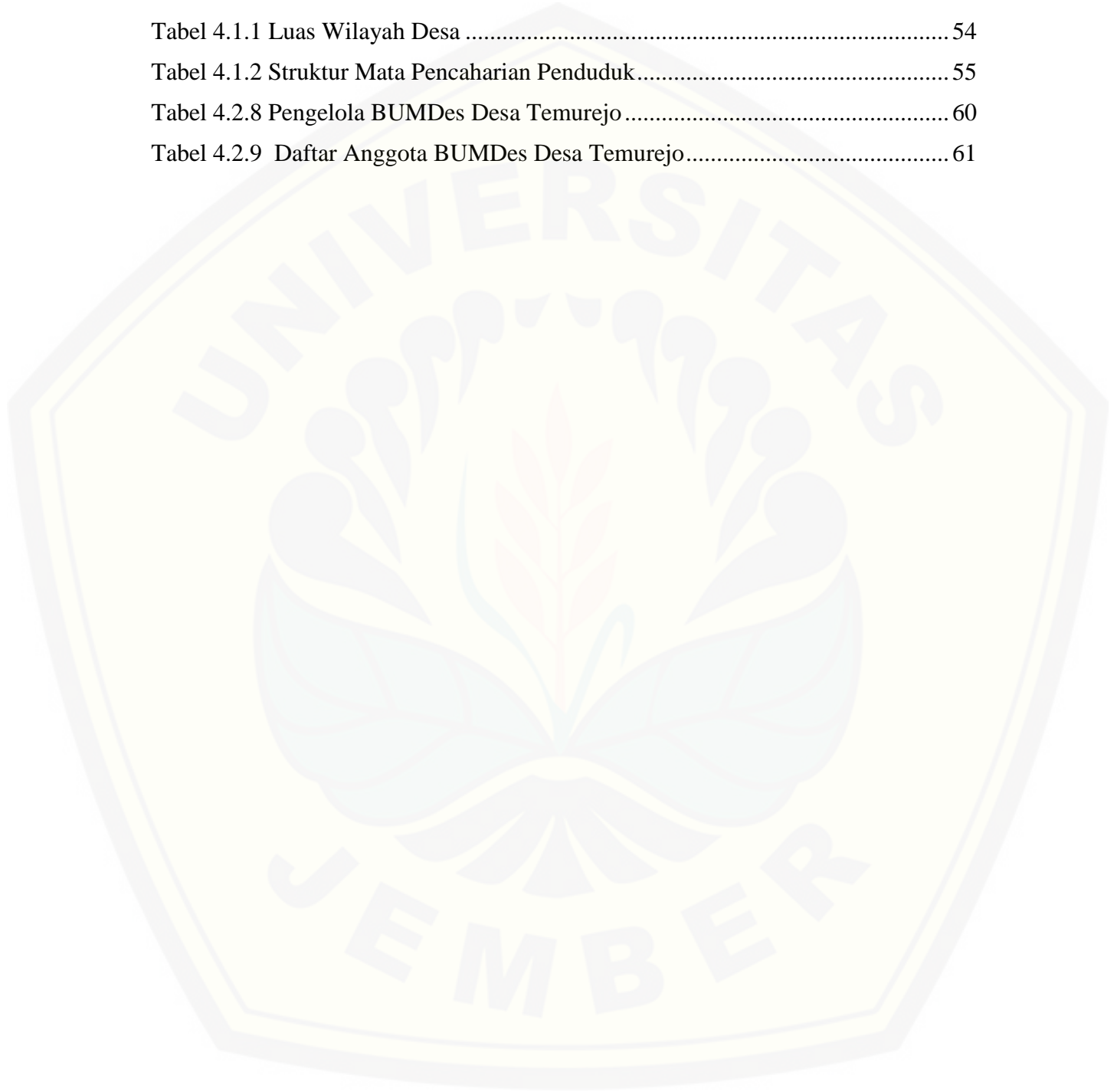
	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN BIMBINGAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial .....	11
2.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	15
2.2.1 Tahapan-Tahapan Pemberdayaan .....	18
2.3 Konsep Peran.....	21
2.4 Konsep Kelembagaan.....	25
2.5 Konsep Efektivitas Lembaga.....	28
2.6 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	31
2.6.1 Tujuan dan Fungsi Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	31

2.6.2 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	32
2.7 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu .....	35
2.8 Alur Pikir Penelitian .....	37
<b>BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	39
3.2 Jenis Penelitian .....	40
3.3 Fokus Penelitian .....	41
3.4 Penentuan Lokasi Penelitian .....	41
3.5 Teknik Penentuan Informan .....	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.6.1 Observasi .....	45
3.6.2 Wawancara .....	46
3.6.3 Dokumentasi .....	48
3.7 Teknik Analisa Data .....	48
3.8 Teknik Keabsahan Data .....	52
<b>BAB 4 PEMBAHASAN</b> .....	<b>54</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	54
4.2 Profil BUMDEs .....	56
4.2.1 Sejarah Berdirinya BUMDes Al-Madina .....	56
4.2.2 Maksud dan Tujuan BUMDes .....	57
4.2.3 Kegiatan BUMDes .....	57
4.2.4 Visi Dan Misi BUMDes .....	58
4.2.5 Landasan Hukum BUMDes .....	59
4.2.6 Persyaratan Menjadi Anggota BUMDes .....	59
4.2.7 Sruktur Organisasi BUMDes .....	59
4.2.8 Pengelola BUMDes Desa Temurejo .....	60
4.2.9 Anggota BUMDes Desa Temurejo .....	61
4.3 Deskripsi Informan .....	61

4.4 Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan dan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.....	63
4.5 Upaya Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	76
4.5.1 Tahap Persiapan.....	76
4.5.2 Tahap <i>Assesment</i> .....	77
4.5.3 Tahapan Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan.....	78
4.5.4 Tahap pemformulasian Rencana Aksi.....	79
4.5.5 Tahapan Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan.....	80
4.5.5.1 Simpan Pinjam/ Permodalan.....	80
4.5.5.2 Persewaan Tanaman Jeruk dan Penanaman Buah Naga.....	81
4.5.5.3 Peternakan Hewan.....	84
4.5.6 Tahap Evaluasi.....	85
4.5.7 Tahapan Terminasi.....	87
<b>BAB 5. PENUTUP</b> .....	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	91
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1.1 Luas Wilayah Desa .....	54
Tabel 4.1.2 Struktur Mata Pencaharian Penduduk.....	55
Tabel 4.2.8 Pengelola BUMDes Desa Temurejo.....	60
Tabel 4.2.9 Daftar Anggota BUMDes Desa Temurejo.....	61





**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Tahapan Intervensi Sosial .....	19
Gambar 2.2 Alur Pikir Penelitian.....	37
Gambar 3.1 Alur Analisis Data.....	49
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BUMDes Desa Temurejo.....	60
Gambar 4.2 Bapak Ali Mahsun dan Mujiono beserta Pemda.....	69
Gambar 4.3 Bapak Ali Sulton dan Pkerjanya .....	71
Gambar 4.4 Dokumentasi dengan Bapak Sariyanto .....	83
Gambar 4.4 Wawancara dengan Bapak Subayan .....	85

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Guide Interview

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

Lampiran 3. Dokumentasi

Lampiran 4. Surat Ijin dari Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Jember

Lampiran 5. Surat Ijin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL)  
Kabupaten Banyuwangi

Lampiran 6. Surat Ijin Penelitian dari Kecamatan Bangorejo

Lampiran 7. Surat Ijin Penelitian dari Kantor Desa Temurejo

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan dilaksanakannya pembangunan nasional ialah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

Bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan. Oleh karena itu titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan. Pada kenyataannya pembangunan pedesaan masih kurang sehingga masih banyak pedesaan yang tertinggal. Menurut data Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), terdapat 38.232 (54,14 persen) kategori desa maju, yang terdiri dari 36.793 (52,03 persen) kategori maju dan 1.493 (2,11 persen) kategori amat maju. Sementara itu, desa tertinggal berjumlah 32.379 (45,86 persen) yang terdiri dari 29.634 (41,97 persen) kategori tertinggal dan 2.745 (3,89 persen) kategori amat tertinggal. (sumber: <http://kemenegpdt.go.id/>). Dari data

tersebut dapat disimpulkan bahwa daerah tertinggal di Indonesia hampir separuhnya masih tertinggal. Tentu langkah-langkah untuk mengentaskan daerah tertinggal sudah banyak dilakukan oleh pemerintah seperti anggaran untuk pembangunan desa yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun agar mampu mengurangi jumlah desa tertinggal, namun pada kenyataannya desentralisasi fiskal kurang optimal berjalan sehingga menyebabkan pembangunan basis perekonomian di desa yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersendat.

Banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program ialah intervensi pemerintah terlalu besar, (sumber: <http://www.bangsakaya.com/>) akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam dalam upaya pengembangan ekonomi di pedesaan melalui program-programnya. Namun upaya-upaya tersebut tidak mendapatkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan bersama.

Berangkat dari pengalaman masa lalu, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (*Base on village*). Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup (1) pengembangan kelembagaan; (2) pemberdayaan masyarakat; (3) pengembangan ekonomi lokal dan (4) pembangunan sarana dan prasarana. (Sumber: <http://www.kemenegpdt.go.id/>) Skala prioritas ini diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, salah satunya melalui pendirian pengembangan kelembagaan basis ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat. Lembaga pengembangan ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar intruksi pemerintah akan tetapi berangkat dari adanya potensi yang ada, sehingga jika dikelola dengan baik

akan menggerakkan roda perekonomian. Agar keberadaan lembaga pengembangan ekonomi ini tidak dikuasai pihak tertentu (pemilik modal besar) maka kepemilikan lembaga ini harus dikelola oleh desa dan dikontrol bersama-sama sehingga tujuan utama lembaga dalam pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Salah satu kelembagaan sebagaimana dimaksud diatas adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha ini harus disertai dengan penguatan kapasitas dan dukungan dari pemerintah (kebijakan) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang baru beroperasi sehingga membutuhkan dukungan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. BUMDes dalam melaksanakan kegiatannya dikelola oleh desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi berupa simpan-pinjam, persewaan tanaman buah jeruk dan penanaman buah naga serta pembagian hasil peternakan. Jika lembaga tersebut bekerja dengan baik dan didukung kebijakan yang memadai maka pertumbuhan ekonomi pedesaan akan tergerak ke arah yang lebih baik sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes selanjutnya diharapkan dapat menjembatani upaya penguatan ekonomi pedesaan. Untuk mencapai kondisi yang diharapkan perlu adanya langkah strategi dan taktik guna mengoptimalkan potensi dan kebutuhan pasar serta perlunya penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam perencanaan. Selain itu potensi lokalistik dan dukungan kebijakan pemerintah harus diperhatikan ini untuk meminimalisir tidak berkembangnya lembaga karena rendahnya kegiatan ekonomi di pedesaan. Sehingga perlunya partisipasi masyarakat dalam menjalankan lembaga tersebut.

Pemerintah Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 ayat (1) tentang pemerintahan daerah disebutkan “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip a). Kooperatif yaitu semua komponen yang terlibat didalamnya mampu bekerja sama dengan baik, b). Partisipatif (*'user-owned, user-benefited, and user-controlled'*) yaitu semua komponen yang terlibat harus bersedia secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi c). Transparansi yaitu semua komponen yang terlibat harus diperlakukan secara sama tanpa memandang golongan, suku dan agama, d). Emansipatif/transparan yaitu aktifitas yang dilakukan harus diketahui masyarakat umum, e). Aktifitas akuntable yaitu seluruh kegiatan harus dipertanggung jawabkan dan f). Sustainable dengan mekanisme *member-base* dan *self-help* yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDes yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/ atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan

dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

Provinsi Jawa timur menjadikan desa sebagai penguatan ekonomi lokal dengan mengembangkan BUMDes, hampir setiap kabupaten diwilayah Jawa Timur mempunyai Lokomotif Project BUMDes. Salah satu kabupaten yang mendirikan BUMDes yaitu Kabupaten Banyuwangi, yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi No. 21 Tahun 2011, tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes yang sudah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Banyuwangi tersebut diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di samping itu pemerintah desa juga harus mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap adanya pembentukan dan pengelolaan BUMDes di setiap desa, akan tetapi hanya terdapat beberapa desa yang membentuk dan mengelola BUMDes, misalnya Desa Temurejo. Pembentukan dan pengelolaan BUMDes ini didasarkan pada kebutuhan dan potensi serta untuk

mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh petani. Mengingat potensi pertanian Desa Temurejo yang sangat berlimpah seperti tanaman buah jeruk, buah naga, padi, kedelai dan untuk mengatasi hambatan yang dirasakan oleh masyarakat. Berangkat dari adanya potensi dan kebutuhan yang ada di masyarakat tersebut yang jika dikelola potensi dengan tepat akan menggerakkan roda perekonomian di daerah tersebut sehingga dapat mewujudkan serta mengatasi permasalahan yang ada dan dapat menjadikan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat. Akan tetapi adanya potensi tidak diikuti dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertanian. Misalnya petani sering mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pertanian seperti kesulitan modal, obat-obatan pertanian, pupuk dan pengairan. Permasalahan lain yang dihadapi adalah petani kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian mereka karena minimnya pengetahuan serta sumberdaya manusia, dan sering kali petani hanya menggandalkan tengkulak untuk membeli hasil pertanian mereka dengan harga dibawah standar. Oleh sebab itu pemerintah desa mencoba untuk memfasilitasi agar semua kebutuhan dan kesulitan yang di alami oleh masyarakat desa bisa terpenuhi.

Pemerintah Desa yang sebelumnya mendapat sosialisasi tentang pembentukan dan pengelolaan BUMdes semakin mempunyai semangat dalam mendirikan BUMDes, ini juga karena faktor kondisi kesulitan yang dialami petani di Desa Temurejo dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Pada intinya pemerintah desa mempunyai inisiatif untuk mengatasi kesulitan petani serta dapat memanfaatkan potensi pertanian di Desa Temurejo melalui BUMDes. Pendirian BUMDes yang dilakukan oleh Pemerintah desa didasarkan surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 28 Desember Nomor: 141/ 13137/ 011/ 2005 tentang pengembangan BUMDes, serta adanya surat Bupati Banyuwangi Tanggal 1 Februari 2006 Nomor 4126/ 270/ 416/ 204/ 2006 tentang penunjukan dan pembentukan BUMDes. Selanjutnya, Kepala Desa beserta Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa dengan tokoh masyarakat beserta perwakilan dari masyarakat untuk menentukan pengurus/pengelola dan merumuskan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BUMDes.



Sesuai dengan hasil musyawarah, BUMDes di Desa Temurejo diberi nama “BUMDes Al-Madina” yang bergerak dibidang simpan pinjam, penanaman jeruk dan peternakan. Dengan demikian BUMDes Desa Temurejo berdiri pada tanggal 19 Agustus 2006. Adapun sumber modal BUMDes yaitu bantuan Pemerintah daerah, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan lain-lain. Didirikannya BUMDes Al-Madina ini bertujuan untuk menguatkan pengelolaan keuangan, meningkatkan pengelolaan potensi dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya alam di desa seperti bidang pertanian, bidang peternakan maupun bidang industri dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa sehingga dapat mensejahterakan masyarakat desa.

Berdasarkan observasi yang dilakukan (Oktober, 2014) dan informasi dari anggota BUMDes, bahwasannya keberadaan BUMDes Al-Madina memberikan dampak positif pada masyarakat Desa Temurejo. Salah satu anggota BUMDes yang merasakan dampak positifnya ialah Bapak Subayan. Dampak BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan sangat dirasakan oleh Bapak Bayan yang dahulu berprofesi sebagai buruh petani. Dengan adanya pinjaman modal dari BUMDes, Bapak Bayan yang sebelumnya tidak mempunyai garapan sawah dapat mempunyai lahan garapan (sewa). keberadaan garapan sawah (sewa) membantu Bapak Bayan dalam meningkatkan penghasilannya. Disamping itu Bapak bayan juga membuka usaha lain seperti berternak dengan menggunakan modal yang telah dipinjam dari BUMDes Al-Madina.

Selain Bapak Bayan yang mendapatkan dampak positif adanya BUMDes, Ibu Mujiono juga mendapatkan manfaat dari keberadaan BUMDes tersebut. Ibu Mujiono yang berprofesi sebagai petani dengan adanya pinjaman dari BUMDes, mampu membuka usaha *mikro* berupa toko sembako. Dengan adanya usaha tersebut, kebutuhan ekonomi Ibu Mujiono yang semula hanya bergantung pada hasil pertanian dapat menambah penghasilan lainnya melalui toko sembako tersebut, sehingga kebutuhan ekonomi dapat tercukupi. Pemberian modal yang dilakukan oleh BUMDes guna membantu dalam meningkatkan kesejahteraan para anggota-anggotanya.

Dengan demikian pemberian pinjaman modal yang dilakukan oleh BUMDes Al-Madina merupakan salah satu implementasi peran BUMDes dan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan sumber pendapatan ekonomi anggota BUMDes sehingga kesejahteraan sosial dapat tercapai, hal itu yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang peran BUMDes yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Temurejo.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”** (Studi Kasus di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sebelum penulis mengungkapkan permasalahan yang menjadi masalah dalam suatu penelitian yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut, maka penulis memberikan sedikit tentang definisi dari masalah tersebut. Menurut Surakhmad (1982:24) bahwa :

“Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui dengan jalan mengatasinya apabila kita akan berjalan terus”.

Dari uraian diatas maka perumusan masalah diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah untuk mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu peneliti diharapkan dapat memahami permasalahan yang terjadi dan pembatasan masalah sehingga menghindari penyimpangan-penyimpangan yang jauh dari objek yang akan diteliti. Perlunya perumusan masalah akan membantu peneliti dalam mengumpulkan data lapangan serta data yang dikumpulkan mempunyai kaitannya terhadap permasalahan yang akan dirumuskan.

Dalam penelitian ini masalah yang ada di Desa Temurejo ialah petani masih belum dapat mengakses sarana dan prasarana. Selain itu Desa Temurejo telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan untuk mengatasi masalah petani yaitu memenuhi segala kebutuhan sarana dan prasarana petani serta menjadikan BUMDes sebagai wahana dalam memasarakan potensi yang ada di desa. Salah satu anggota BUMDes yang merasakan dampak positif terhadap masalah yang dialami (sarana dan prasarana) ialah Bapak Subayan. Dampak BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan sangat dirasakan oleh bapak Bayan yang dahulu berprofesi sebagai buruh petani. Dengan adanya pinjaman modal dari BUMDes yang sebelumnya Bapak Bayan tidak mempunyai garapan sawah mempunyai lahan garapan (sewa). Disamping itu Bapak Bayan juga membuka usaha lain seperti berternak dengan menggunakan modal yang telah dipinjam dari BUMDes Al-Madina. Pemberian pinjaman modal yang dilakukan oleh BUMDes guna membantu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial para anggota-anggotanya.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan berusaha mengetahui dan merumuskan permasalahan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah “Mendeskripsikan dan Menganalisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi”.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan tersebut di atas maka manfaat berdasarkan dari hasil penelitian. Dalam hal ini manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya ilmu kesejahteraan sosial terkait peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat desa.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan input positif bagi pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat desa, agar menjadikan pendorong peningkatan kinerja suatu lembaga dalam mencapai tujuannya.
3. Hasil penelitian ini dapat menambah bahan acuan, dan bahan informasi bagi peneliti lain yang mengambil tema yang sama dengan harapan dapat dilakukan penelitian lanjutan atau pengembangan dari penelitian ini, dalam hal ini ialah tentang peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Terkait dengan fenomena tersebut, maka diperlukan teori atau konsep-konsep dasar yang dapat dijadikan acuan atau pegangan terhadap suatu penelitian untuk menjelaskan menggambarkan ataupun mendeskripsikan apa yang diperoleh dalam penelitian. Pentingnya landasan serta kerangka berfikir untuk dapatnya mengkaji masalah menjadi sasaran dalam penelitian untuk dapat dipertanggung jawabkan dan dibuktikan kebenarannya. Menurut Singgarimbun dan Effendi (1989:37) mengemukakan bahwa:

“Fungsi dari suatu teori dalam penelitian adalah bahwa dengan unsur ilmu itulah mencoba menerangkan fenomena sosial dan fenomena alami yang menjadi pusat penelitian”.

Sehingga bagi seorang peneliti dituntut untuk dapat berfikir secara sistematis dan rasional serta selalu berpegang teguh pada pedoman dan kaidah-kaidah ilmiah yang telah disepakati bersama. Sehingga dasar teori merupakan landasan berfikir untuk memahami serta menanggapi permasalahan yang ada. Untuk itu konseptual teoritis dalam penelitian “Peran Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa” (Studi kasus di desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi).

### 2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kondisi sejahtera (*well\_being*) biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*sosial welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Menurut (Midgley, 2000:xi) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “*a condition or state of human well-being*” kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia yang aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat terpenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang

relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Midgley dalam (Huda, 2009:72) menyatakan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama: (1) ketika masalah sosial dapat *dimenej* dengan baik, (2) ketika kebutuhan terpenuhi, dan (3) ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal. Definisi tersebut dapat dijelaskan, bahwa setiap manusia memiliki kemampuan manajemen yang berbeda terhadap penyelesaian suatu masalah. Salah satu masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini adalah masalah sosial. Kemampuan dalam mengelola setiap masalah yang timbul menjadikan manusia mencapai taraf kesejahteraannya. Agar dapat memahami lebih dalam tentang kesejahteraan sosial berikut definisi tentang kesejahteraan sosial menurut para ahli.

Menurut definisinya kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu (Suud, 2006:4-8). Menurut (Suharto, 2006:3) kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan sebagai berikut dibawah ini.

Menurut Suparlan dalam (Suud, 2006:5) kesejahteraan sosial, menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja; jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan.

Kesejahteraan sosial menurut Friendlander dalam (Suud, 2006:8):

Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Gambaran tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial juga merupakan usaha manusia segala kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi melihat upaya mendapatkan titik seimbang antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun keseimbangan aspek material dan spiritual, tanpa melupakan kewajiban sebagai warga negara yang berasaskan Pancasila demi meningkatkan kesejahteraan.

Definisi kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan yang dikemukakan oleh Durham dalam (Suud, 2006:7), kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan penduduk yang lebih luas. Pelayanan-pelayanan ini meliputi perawatan, penyembuhan, dan pencegahan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan saling membantu, agar kehidupan ini berjalan selaras dan harmonis menciptakan suasana yang sejahtera.

Selanjutnya Wilensky dan Lebeaux dalam (Suud, 2006:7) merumuskan kesejahteraan sosial sebagai:

“Sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat kehidupan dan kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu-individu pengembangan kemampuan-kemampuan mereka seluas-luarnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat”.

Arti kesejahteraan yang terakhir adalah kesejahteraan sosial sebagai ilmu, orang-orang yang mempunyai berbagai macam kebutuhan akan pelayanan tersebut diatas, khususnya yang tidak dapat memenuhinya berdasarkan kriteria pasar, maka mereka

menjadi sasaran atau perhatian kesejahteraan sosial (Suhartono, 1993:6). Aksi sosial sebagai metode bantu dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial dapat melalui jalan perundang-undangan. Menurut Segal dan Brzuzy dalam (Suud, 2006:90), kebijakan sosial juga merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial terdiri dari usaha-usaha dan struktur-struktur yang terorganisasi untuk menyediakan kesejahteraan masyarakat. Dalam bentuk sederhana, sistem kesejahteraan sosial dapat dikonseptualisasikan sebagai empat bagian yang saling berhubungan yaitu: 1) Isu-isu Sosial, 2) tujuan-tujuan kebijakan, 3) perundangan/peraturan, 4) program-program kesejahteraan sosial. Sekali isu tersebut diakui oleh sebagai perhataan sosial, langkah selanjutnya adalah mengartikulasikan tujuan-tujuan kebijakan. Tujuan-tujuan ini dapat menghasilkan suatu posisi publik yang diciptakan melalui perundangan/ peraturan. Akhirnya, perundangan diterjemahkan ke dalam tindakan melalui penerapan suatu program kesejahteraan sosial.

Gambaran definisi kesejahteraan sosial diatas mengandung pengertian bahwa kesejahteraan sosial mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk mencapai taraf hidup manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi, dan spiritual. Selain itu kesejahteraan sosial dianalogikan sebagai suatu keadaan, kegiatan dan suatu ilmu yang berusaha untuk mengembangkan metodologi (termasuk aspek strategi dan teknik) untuk menangani berbagai macam masalah sosial, baik tingkat individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat.

Salah satu bentuk usaha Pemerintah Desa Temurejo dalam melakukan peningkatan kesejahteraan sosial ialah melalui kegiatan-kegiatan atau pelayanan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desadengan harapan dapat menjadikan penggerak perekonomian masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Pasal 3 UU nomor 11 tahun 2009, penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:



1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan keberlangsungan hidup
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkait dengan kesejahteraan sosial diatas yaitu meningkatkan kondisi kehidupan dan keseimbangan sosial baik secara rohaniah maupun jasmaniah. Peningkatan kondisi kehidupan tersebut ditempuh dengan jalan menumbuhkan, membina, dan mengembangkan keselarasan hidup masing-masing manusia serta menciptakan lingkungan yang baik meliputi segi fisik, mental, dan sosial.

## 2.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan kesejahteraan sosial dalam arti luas pada dasarnya juga merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan terhadap kelompok sasaran seringkali diindentikan sebagai upaya memberdayakan (mengembangkan kelompok sasaran dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik (Adi, 2005:161-162). Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata power yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Oleh karena itu ide utama pemberdayaan ini selalu bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Menurut (Ife, 1995:61-64), pengertian kekuasaan tidak berhenti pada kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan seseorang atas beberapa hal berikut.

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan: kemampuan mengespresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan, dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
- e. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber, informal dan masyarakatan.
- f. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.
- g. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Ife (1995:182) juga menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas itu sendiri. Selain itu (Ife, 1995:56) menambahkan pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuatan mereka yang tidak beruntung.

Hal ini berlaku pada suatu pemberdayaan masyarakat, dimana dalam suatu komunitas, proses pemberdayaan masyarakat tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program, baik program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Proses pemberdayaan akan berlangsung selama komunitas itu tetap ada dan mau berusaha untuk memberdayakan dirinya.

Menurut Chambers dalam (Kartasmita, 1996:142), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centered, participatory, empowering, and sustainable*”. Sedangkan Kartasmita menjelaskan bahwa memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu

untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Kemudian Friedman dalam (Kartasasmita, 1996:143). menyatakan bahwa:

“Pendekatan pemberdayaan adalah hal mendasar dalam pembangunan alternatif, menekankan pada anatomi dalam pengambilan keputusan dari masyarakat yang secara teritorial terorganisasi, memperkuat kemandirian lokal (tetapi tidak autarki) demokrasi langsung (partisipatoris), dan pengalaman bersosial”.

Terkait dengan definisi di atas, pembangunan alternatif bertujuan untuk memanusiakan suatu sistem yang membungkam mereka dan mencapai tujuan ini diperlukan bentuk-bentuk perlawanan dan perjuangan politis yang menekankan hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara yang tersingkir. Shardlow dalam (Adi, 2005:162) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya adalah membahas bagaimana individu, kelompok, maupun komunitas, berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Shardlow menggambarkan pemberdayaan sebagai suatu gagasan yang dikenal sebagai *self determination*, yaitu usaha mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi masalah yang ia hadapi. Sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.

Dari pengertian pemberdayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan-pemberdayaan merupakan satu cara untuk menjadikan orang yang tidak atau kurang berdaya menjadi berdaya, memaksimalkan kualitas hidup kemanusiaan, merelokasi kekuatan/kekuasaan melalui modifikasi struktur sosial, serta proses untuk memperoleh kekuatan, kompetisi, kebebasan dan kemerdekaan diri sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan (Adi, 2005:70-75) bahwa pemberdayaan menekankan pada proses goal, yaitu tujuan yang berorientasi pada proses yang mengupayakan integrasi masyarakat dan dikembangkan kapasitasnya guna memecahkan masalah mereka secara kooperatif atas dasar kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri (*self help*) sesuai prinsip demokratis.

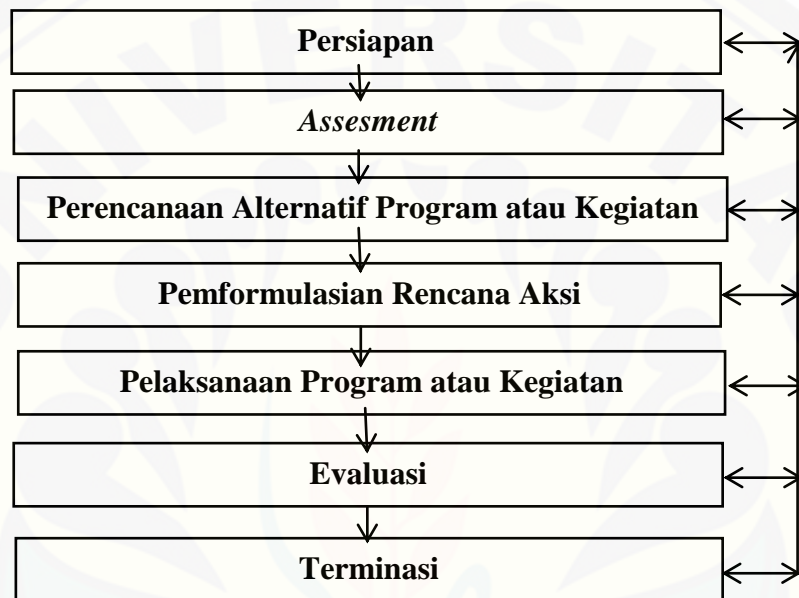
Adapun pengertian pemberdayaan yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan pengertian dari beberapa pengertian diatas, yaitu pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka. Dengan demikian, mereka dapat menolong diri mereka sendiri dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup mereka yang semula keadaan yang tidak atau kurang berdaya menjadi berdaya. Alasan menggunakan definisi tersebut dalam penelitian ini karena penelitian ini berusaha melihat peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat desa (Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi).

Pemberdayaan sebagai suatu program dimana pemberdayaan dilihat dari tahap-tahap kegiatan guna mencapai tujuan, yang biasanya telah ditentukan jangka waktunya. Pemberdayaan sebagai suatu program harus direncanakan secara serius dan lebih memfokuskan pada upaya-upaya yang membuat masyarakat agar dapat lebih pandai, mampu mengembangkan komunikasi antar mereka, sehingga pada akhirnya mereka dapat saling berdiskusi secara konstruktif dan mengatasi permasalahan yang ada. Jadi ketika agen perubahan berasal dari luar (baik itu berasal dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah), telah menyelesaikan programnya maka pemberdayaan sebagai suatu proses tetap berlangsung pada kelompok sasaran tersebut (Adi, 2005:176).

### 2.2.1 Tahapan-Tahapan Pemberdayaan

Tahapan intervensi sosial dalam program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu siklus perubahan yang berusaha mencapai taraf yang lebih baik. (Adi, 2005:179) “menjabarkan tahapan pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan berdasarkan masukan dari Cox mengenai tahapan dalam program pemberdayaan masyarakat”. Model pemberdayaan, meskipun disebut sebagai tahapan, namun bukanlah suatu tahapan yang menyerupai anak tangga, dimana seseorang harus

berjalan melalui tahap demi tahap secara berurutan, melainkan merupakan tahapan yang berbentuk siklus (*cyclical*) dan spiral dimana agen perubahan dimungkinkan untuk kembali ke tahap sebelumnya apabila mendapatkan masukan baru yang dapat digunakan untuk menyempurnakan program pemberdayaan tersebut. Tahapan dalam program pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam skema berikut:



Gambar 2.1 Tahapan Intervensi Sosial Sumber: (Adi, 2005:179)

Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa:

#### 1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dibagi menjadi dua, yaitu pertama, Tahap penyiapan petugas dilapangan, berguna untuk menyamakan persepsi antara anggota tim agen perubah dan metode apa yang akan di gunakan dalam pengembangan masyarakat. Kedua tahap penyiapan lapangan, petugas (*community worker*) pada awalnya melakukan studi kelayakan daerah yang akan dikembangkan, baik formal atau informal.

#### 2. Tahap *Assesment*

Proses *Assesment* yang dilakukan disini dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan), dan sumberdaya yang dimiliki klien. Dan dalam tahap

*assessment* ini (penilaian) juga bisa menggunakan metode SWOT, dengan melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Pada tahapan ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan keluar dari mereka sendiri.

### 3. Tahapan Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahapan ini petugas (*community worker*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

### 4. Tahap pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk memformulasikan gagasan dalam bentuk tertulis, terutama yang ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pihak yang penyanggah dana.

### 5. Tahapan Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan

Pada tahapan pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang telah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antar petugas dan warga masyarakat, maupun kerjasama antara warga.

### 6. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai tahap pengawasan terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

### 7. Tahapan Terminasi

Tahapan ini merupakan tumpahan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran, karena dipandang komunitas tersebut sudah mandiri dan berhasil memecahkan masalahnya atau batas waktu yang ditentukan sudah selesai serta bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana.

Kesimpulannya peran BUMDes dari beberapa tahapan dalam pemberdayaan bertujuan untuk membantu masyarakat, individu atau kelompok yang berada pada titik tidak berdaya untuk segera dan harus diberdayakan. Agar dapat meningkatkan kapasitas yang diarahkan pada kemandirian dan kekuatan internal. Karena pembangunan sosial adalah inti pokok dalam kehidupan sejahtera untuk dapat mengakses kebutuhan mereka dalam melangsungkan kehidupan, dengan prinsip, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan sosial.

### 2.3 Konsep Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Soekanto (2013:212) peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti (Ralph Linton dalam Soekanto, 1982:213). Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya Peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya (Ely Chinoy dalam Soekanto, 1982:213). Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma dan aturan yang berlaku, misalnya organisasi BUMDes pengurus didalamnya berperan

dalam menjalankan roda organisasi yang sudah disepakati bersama dalam rapat anggota dan menjalankan perannya.

Menurut Mariono (dalam Soekanto, 1982:215), menyebutkan beberapa macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- a. Peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut

Sesuai pendapat tersebut peran lembaga atau petugas pemberdayaan masyarakat (pekerja sosial) dalam BUMDes dianalogikan sebagai individu-individu yang menjalankan peran pada masing-masing kedudukan (status). Peran merupakan suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik di masyarakat. Menurut Achlis (1983:33), “Peran adalah pola tugas dan tingkah laku yang diharapkan berkaitan dengan status sosial tertentu, yang dieskpresikan menurut pengertian dan batasan-batasan tertentu serta berkaitan dengan tingkah laku dan relasi dengan orang lain”.

Istilah peran memiliki banyak arti. Konsep peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Menurut Soekanto, (1982:213), peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat yaitu *sosial position* merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak



menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Menurut Levinson (dalam Soekanto, 1982:213), mengatakan peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat. Sedangkan dalam menjalankan setiap lembaga selalu dilakukan oleh pengurus. Pengertian pengurus dalam kamus bahasa Indonesia (2009:34) :

“Pengurus ialah penyelaras dan pengaruh dalam lembaga. Dimana pengurus bertugas mengawasi aliran kerja di dalam lembaga dan menyatupadukan semua unsur lembaga. Pengurus bertanggung jawab menggunakan segala sumber dengan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengurus juga memiliki tugas untuk merancang dan mengimplementasikan strategi untuk berjalannya suatu kegiatan lembaga yang baik”

Pengurus BUMDes melakukan pemberdayaan bagi masyarakat. Peran pengurus BUMDes diorientasikan sebagai *volunteer* (relawan). Menurut Adi (2005:94) “relawan (bidang sosial) adalah mereka yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial, tetapi bukan berasal dari (lulusan) atau tidak mendapat pendidikan khusus dari sekolah pekerjaan sosial ataupun ilmu kesejahteraan sosial.”

Usaha kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan suatu program ataupun kegiatan yang desain secara kongkrit untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf hidup masyarakat. Usaha kesejahteraan

sosial ini dapat ditujukan pada individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam komunitas, ataupun komunitas secara keseluruhan (baik komunitas lokal, regional, maupun nasional) (Adi, 2005:86).

Seperti yang diungkapkan sebelumnya, pengurus BUMDes merupakan relawan atau pekerja sosial yang mempunyai pekerjaan dibidang kesejahteraan sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Adi (2005:91) pekerja sosial adalah seseorang yang berprofesi dibidang pekerjaan sosial. Oleh karena itu BUMDes sebagai wadah pemberdaya melakukan perubahan kepada masyarakat. Adapun peran relawan atau pekerja sosial menurut Spergel, Zastrow dan Adi dalam Adi (2008:141-146) adalah:

1. Pemercepat perubahan (*enabler*)

Peran sebagai *enabler* yaitu membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka; mengidentifikasi masalah mereka; dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif.

2. Perantara (*broker*)

Peran sebagai *broker* yaitu menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat (*community services*), tetapi tidak tahu di mana dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat

3. Pendidik (*educator*)

Peran sebagai *educator* yaitu memprasyaratkan *community worker* mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta mudah ditangkap oleh komunitas yang menjadi sasaran perubahan

4. Tenaga Ahli (*expert*)

Peran sebagai *expert* yaitu memprasyaratkan adanya kemampuan untuk dapat memberi masukan, saran dan dukungan informasi dalam berbagai area

5. Perencanaan Sosial (*social planner*)

Peran sebagai *social planner* yaitu membutuhkan kemampuan pelaku perubahan dalam mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam komunitas, menganalisis dan menyajikan alternatif tindakan rasional untuk menangani masalah tersebut.

6. Advokat (*advocate*)

Peran sebagai *advocate* yaitu mendorong pelaku perubahan untuk menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu layanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan bantuan ataupun layanan tersebut tidak memberikan bantuan layanan tersebut tidak memedulikan (bersifat negatif ataupun menolak tuntutan warga)

7. Aktivist (*activist*)

Peran sebagai *activist* yaitu menuntun pelaku perubahan untuk melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dan sering kali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan (*power*) pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan (*disadvantaged group*), yang dianggap sebagai korban.

Sebagaimana teori di atas digunakan oleh pengurus BUMDes dalam melakukan perannya sebagai pemercepat perubahan, perantara, pendidik, tenaga ahli, perencanaan sosial, advokat dan aktivis yang dimanfaatkan untuk menganalisis kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi masalah serta memanfaatkan potensi daerah.

Dengan demikian peranan petugas pemberdayaan masyarakat (pekerja sosial) tersebut, selanjutnya dapat menjalankan roda organisasi yang ada di BUMDes sehingga dapat menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan penelitian ini bahwa BUMDes diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai lembaga yang berusaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan anggota melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Berbagai macam kegiatan yang ada di dalam BUMDes dapat memberikan peran yang signifikan bagi peningkatan penghasilan masyarakat di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.

#### **2.4 Konsep Kelembagaan**

Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan yang kemudian berkembang di dalam ilmu ekonomi karena kini mulai banyak ekonom berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi umumnya karena kegagalan kelembagaan. Dalam sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada

norma, tingkah laku dan adat istiadat. Dalam bidang politik kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) untuk kepentingan bersama atau umum (*public*), ilmu psikologi melihat kelembagaan dari sudut tinglah laku manusia (*behaviour*). Ilmu hukum menegaskan pentingnya kelembagaan dari sudut hukum, aturan dan penegakan hukum serta instrument dan proses ligitasinya (Djogo, 2003:11).

Djogo (2003:14) juga menyebutkan bahwa pada umumnya definisi lembaga mencakup konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang. Dalam konteks ini sangat penting diperhatikan bahwa perilaku sosial tidak membatasi lembaga pada peraturan yang mengatur perilaku tersebut atau mewajibkan orang atau organisasi untuk harus berfikir positif kearah norma-norma yang menjelaskan perilaku mereka tetapi juga pemahaman akan lembaga ini memusatkan perhatian pada pengertian mengapa orang berperilaku atau bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan yang ada.

Kelembagaan berisikan dua aspek penting yaitu “aspek kelembagaan” dan “aspek keorganisasian”. Aspek kelembagaan meliputi perilaku atau perilaku sosial dimana inti kajiannya adalah tentang nilai (*value*), norma (*norm*), *custom*, *mores*, *folkways*, *usage*, kepercayaan, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi dan lain-lain. Bentuk perubahan sosial dalam aspek kelembagaan bersifat kultural dan proses perubahannya membutuhkan waktu yang lama. Sementara pada aspek keorganisasian meliputi skruktur atau stuktur sosial dengan inti kajiannya terletak pada aspek peran (*role*). Lebih jauh stuktural mencakup: peran aktivitas, hubungan antara peran, integrasi sosial, struktur kewenangan atau kekuasaan, hubungan antara kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek solidaritas, klik, profil dan pola kekuasaan. Bentuk perubahan sosial dalam aspek keorganisasian bersifat structural dan berlangsung relatif cepat (Subagio, 2005:17).

Israel (1992) mengungkapkan bahwa konsep umum mengenai lembaga meliputi apa yang ada pada tingkat lokal masyarakat, unit manajemen proyek, institusi-institusi, departemen-departemen di pemerintah pusat dan sebagainya.

Sebuah lembaga dapat merupakan milik negara atau sektor swasta dan juga bisa mengacu pada fungsi-fungsi administrasi pemerintah. Sedangkan menurut Uphoff dalam (Shahyuti, 2003:25), istilah kelembagaan dan organisasi sering membingungkan dan bersifat *interchangeably*. Secara keilmuan, '*social institution*' dan '*social organization*' berada dalam level yang sama, untuk menyebut apa yang kita kenal dengan kelompok sosial, grup, sosial form dan lain-lain yang relatif sejenis. Namun, perkembangan akhir-akhir ini, istilah "kelembagaan" lebih sering digunakan untuk makna yang mencakup keduanya sekaligus. Ada beberapa alasan kenapa orang-orang lebih memilih istilah tersebut. Kelembagaan lebih dipilih karena kata "organisasi" menunjuk kepada suatu sosial form yang bersifat formal, dan akhir-akhir ini semakin cenderung mendapatkan *image* negatif.

Sejalan dengan pernyataan Subagio, Koentjaraningrat, (1974:36) menyatakan tujuan dari kelembagaan sosial adalah memenuhi kebutuhan pokok manusia, maka ia dapat dikategorikan berdasarkan jenis-jenis kebutuhan pokok tersebut. Kemudian mengkategorikannya ke dalam delapan golongan sebagai berikut:

1. Kelembagaan kekerabatan/domestik: memenuhi kebutuhan hidup kekerabatan. Contoh: pelamaran, poligami, perceraian dan lain-lain
2. Kelembagaan ekonomi: memenuhi pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, mesdistribusikan harta benda. Contoh: pertanian, peternakan, industri, koperasi, perdagangan, sambatan, dan lain-lain
3. Kelembagaan pendidikan: memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Contoh: pendidikan dasar/menengah/tinggi, pers dan lain-lain
4. Kelembagaan ilmiah: memenuhi kebutuhan ilmiah manusia dan menyelami alam semesta. Contoh: pendidikan ilmiah, penelitian, metode ilmiah, dan lain-lain.
5. Kelembagaan estetika dan rekreasi: kebutuhan manusia untuk menyatakan rasa keindahan dan rekreasi. Contoh: seni rupa, seni suara, seni gerak, kesusastraan, dan lain-lain.
6. Kelembagaan keagamaan: memenuhi kebutuhan manusia untuk keberhubungan dengan Tuhan atau alam gaib. Contoh: upacara, selamatan, pantangan, dan lain-lain
7. Kelembagaan politik: memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan kelompok secara besar-besaran atau kehidupannya

bernegara. Contoh: pemerintah, kepartaian, demokrasi, kepolisian, kehakiman, dan lain-lain

8. Kelembagaan somatik: memenuhi kebutuhan jasmaniah manusia. Contoh: pemeliharaan kesehatan, pemerintahan kecantikan, dan lain-lain.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas kelembagaan sosial menurut Koentjaraningrat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Salah satu jenis kebutuhan pokok manusia yaitu memenuhi pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, mesdistribusikan harta benda, Selanjutnya dimaksud kelembagaan ekonomi, dalam hal ini ialah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

### **2.5 Konsep Efektivitas Lembaga**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas merupakan daya pesan-pesan untuk mempengaruhi, (Susanto, 1975:156). Dari pengertian tersebut, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelum secara matang agar hasil yang diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai (Sedarmayanti, 1995:61). Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri. Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas.

Dari pengertian efektivitas diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan kemampuan memilih alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, berkaitan dengan melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan dan merupakan ukuran tentang pencapaian suatu tugas atau tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan, lembaga atau organisasi harus didukung oleh faktor-faktor pendukung efektifitas. Salah satu faktor pendukung efektifitas yaitu manajemen yang bekerja dengan baik. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha-usaha pencapaian tujuan dapat lebih mudah terwujud. Secara umum fungsi manajemen yaitu POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*). Fungsi ini banyak digunakan oleh lembaga atau organisasi untuk memajukan dan mengelola organisasi mereka.

Menurut George Robert Terry, (2006:29) fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Yang dimaksud dengan perencanaan disini adalah rencana awal atau tujuan awal yang jelas. Dalam perencanaan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu harus SMART.

- *S = Specific*

Artinya perencanaan harus jelas maksud atau ruang lingkupnya. Tidak terlalu melebar dan terlalu idealis.

- *M = Measurable*

Artinya program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya.

- *A = Achievable*

Artinya dapat dicapai, jadi bukan angan-angan.

- *R = Realistic*

Artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, tetapi tetap ada tantangan.

- *T = Time*

Artinya ada batasan waktu yang jelas. Harian, mingguan, bulanan, tahunan sehingga mudah dinilai dan dievaluasi.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Agar tujuan dapat dicapai maka dibutuhkan pengorganisasian. Dalam perusahaan biasanya diwujudkan dalam bentuk bagan organisasi. Yang kemudian di pecah menjadi berbagai jabatan. Semakin tinggi suatu jabatan biasanya semakin tinggi tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Dalam pembagian tugas tersebut maka pekerjaan menjadi ringan. Disinilah salah satu prinsip dari manajemen yaitu membagi tugas sesuai dengan keahliannya.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Kecuali memang ada hal-hal khusus, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Setiap SDM harus Bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan perannya masing-masing.

d. Pengontrolan (*Controlling*)

Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan program kerja maka dibutuhkan pengontrolan. Pengontrolan dilakukan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengorganisasian, sehingga dapat dilakukan koreksi dan antisipasi.

Dari beberapa fungsi manajemen tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas suatu lembaga atau organisasi dapat tercapai tugas dan tujuannya jika pelaku organisasi melaksanakan fungsi manajemen (*Planning, organizing, actuating, controlling*) yang dilakukan dengan baik dan tepat. Jika faktor-faktor efektivitas dijalankan dengan baik maka tujuan-tujuan dari organisasi akan tercapai dengan mudah.



## 2.6 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilalukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dalam (Buku Panduan BUMDes, 2007:5) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Secara umum BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta penguatan perekonomian desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada prinsip *kooparatif, partisipatif, emansipasif, transparansi, akuntable, dan sustainable* (Buku panduan BUMDes, 2007:12). BUMDes didirikan berdasarkan perundang-undangan BUMDes merupakan program pemerintah yang berbasis ekonomi, tujuan tersebut membantu desa meningkatkan pendapatan asli desa dan memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang dan jasa. Modal usaha BUMDes berasal dari desa dan Masyarakat dan bantuan dana dari pemerintah bersumber pada alokasi dana desa yang dianggarkan dalam APBDDes sebagai sumber pendapatan desa.

### 2.6.1 Tujuan dan Fungsi Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Tujuan didirikannya BUMDes adalah:

1. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli desa
2. Memajukan dan mengembangkan perekonomian desa
3. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber
4. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat

Sumber:<http://bapenas.jatiprov.go.id/index.php/program/kegiatan-ppm/278-pengembangan-bumdes> (diakses 10 oktober 2014)

Dalam buku panduan BUMDes (2007:5), ada empat tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Desa yaitu:

- a. Meningkatkan perekonomian asli desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadikan tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan

Fungsi dari BUMDes itu sendiri adalah:

- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran
- d. Membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin di desanya
- e. Memberikan pelayanan sosial (misalnya: pendidikan dan kesehatan) kepada masyarakat desa

Sumber: <http://bapenas.jatiprov.go.id/index.php/program/kegiatan-ppm/278-pengembangan-bumdes> (diakses 10 oktober 2014)

Pengelolaan dan pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya sebagai lembaga ekonomi yang produktif sehingga pengelolaan badan usahanya berjalan secara efektif, efisien, professional, dan mandiri. Pendirian BUMDes sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan membawa manfaat tersendiri bagi desa yang mendirikanannya. Selain untuk peningkatan pendapatan asli desa, BUMDes juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 2.6.2 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan bahwa BUMDes adalah:

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Pasal 213
  - Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa

- Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- Badan usaha milik desa sebagaimana pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundangan-undangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang desa pasal 78
  - Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa
  - Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  - Bentuk Badan Usaha Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang desa pasal 79
  - Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa
  - Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
    - a. Pemerintah Desa;
    - b. Tabungan masyarakat;
    - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
    - d. Pinjaman; dan/atau
    - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menuntungkan.
  - Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang desa pasal 80
  - Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang desa pasal 81
  - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.
  - Peraturan Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
    - a. Bentuk badan hukum
    - b. Kepengurusan
    - c. Hak dan kewajiban
    - d. Permodalan

- e. Bagi hasil usaha atau keuntungan
- f. Kerjasama dengan pihak ketiga
- g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban.

Badan Usaha milik Desa (BUMDesa) juga berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 yang didalam peraturan tersebut dicantumkan ketentuan umum, pembentukan BUMDes, pengelolaan BUMDes, tugas dan kewenangan, jenis usaha dan permodalan, bagi hasil dan rugi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan.

#### **2.6.4 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes (PKDSP FE UB, 2007:11) yaitu:

- a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADes yang selanjutnya dapat

digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (kooperatif), membangun kebersamaan/ menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

### **2.7 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu**

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu berfungsi memberikan landasan serta acuan kerangka berfikir untuk mengkaji masalah yang menjadi saran sebuah penelitian. Untuk mendapat informasi pendukung sebuah penelitian maka perlu dilakukan penelaah kepustakaan yang termasuk didalamnya adalah tinjauan yang terdahulu. Oleh karena itu, adanya tinjauan penelitian terdahulu diperlukan menjadi acuan penelitian yang akan dilakukan, sehingga diketahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang sedang dilakukan.

Kajian penelitian terdahulu diambil dari berbagai penelitian-penelitian yang berhubungan dengan lembaga. Meskipun memiliki perbedaan objek penelitian, dimensi ruang (lokasi), dimensi waktu, pembahasan dalam penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan rujukan berfikir secara teoritik bagi penelitian. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat bersifat original.

Kajian penelitian terdahulu yang menjadi kajian penelitian ini yaitu: Penelitian Moch Yusuf, (2013) Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Jember. Dengan judul penelitian “*Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Perajin Batu Bata (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya (KSP Mandiri Jaya) Di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro*”. Maka penelitian tersebut ingin mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran Koperasi Simpan Mandiri Jaya di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dalam pemberdayaan

masyarakat perajin batu bata. Hasil penelitian ini mendapat kesimpulan bahwa ada beberapa peran yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya yaitu peran koperasi cukup besar secara ekonomi, diantaranya: membantu kelancaran usaha dan pendapatan masyarakat perajin batu bata melalui penyediaan modal pinjaman dalam memenuhi sarana dan prasarana sehingga dengan adanya koperasi masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas peran, dalam penelitian sekarang yaitu peran BUMDes. Sedangkan perbedaan penelitian ini terdapat pada obyek yang diteliti yaitu Koperasi dan BUMDes. Selanjutnya persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian Yusuf sudah diketahui. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni membahas tentang bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya peran yang sudah dilakukan oleh BUMDes kepada masyarakat khususnya petani, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas perekonomiannya dan kehidupannya menjadi sejahtera.

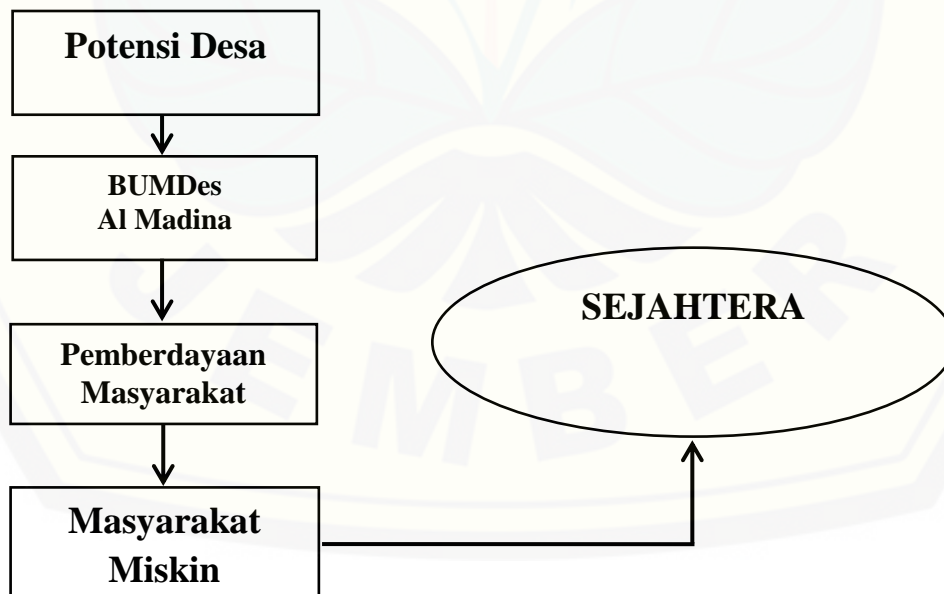
Selain itu kajian penelitian yang terdahulu lainnya yaitu penelitian Aditya Kusuma Admaja, (2006) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Dengan judul penelitian *“Peranan Badan Keswadayaan (BKM) dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di kecamatan Jombang Kabupaten Jombang (Studi Deskriptif Kualitatif pada BKM Sengon Sejahtera Di Desa Sengon Kecamatan Jombang)”*. Maka hasil dari penelitian ini adalah pengawasan dalam pemanfaatan dana bantuan P2KP yang diberikan oleh BKM Sengon Sejahtera dilakukan secara berkala oleh KSM yang dilaporkan pada BKM Sengon Sejahtera berupa LPJKK (Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dan Kegiatan), dan dalam menumbuhkan pemberdayaan masyarakat, BKMSengon Sejahtera memberikan pelatihan keahlian yang bekerja sama dengan pihak/instansi lain, adapun pelatihan yang diberikan mencakup 4 hal yaitu : Pelatihan kerupuk, Airbrush, Bordir dan Manajemen bagi Ketua KSM. Selanjutnya masyarakat miskin mampu

mengaplikasikan apa yang di dapat dalam pelatihan penanggulangan kemiskinan tersebut.

Perbedaan dan persamaan dari penelitian ini antara lain, untuk perbedaan dalam penelitian ini yang pertama adalah tujuan penelitian, dimana Peranan Badan Keswadayaan (BKM) dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sedangkan dalam penelitian sekarang terdapat tujuan untuk mengetahui peranan BUMDes didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. Untuk persamaan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian dimana sama- sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

## 2.8 Alur Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian menjelaskan arah penelitian, sehingga nantinya dapat tergambar tujuan sesuai dengan fokus penelitian. Alur pikir penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan peran BUMDes dalam Pemberdayaan masyarakat Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. Berikut ini di gambarkan alur pikir penelitian berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti.



Gambar 2.2 Alur Pikir Penelitian

Berdasarkan alur fikir penelitian di atas bahwa BUMDes di Desa Temurejo memberikan suatu pelayanan berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan masyarakat miskin. Perlunya peran lembaga ekonomi ini untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan. Selanjutnya BUMDes menjadi sarana untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota BUMDes pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. BUMDes menjadi lembaga ekonomi yang dapat berperan aktif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

BUMDEs Al-Madina merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk berdasarkan adanya kebutuhan dan potensi desa, sehingga dengan adanya BUMDes diharapkan mampu memfasilitasi apa yang dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat miskin yang ada di desa Temurejo sehingga pada akhirnya memberikan dampak positif berupa peningkatan ekonomi yang lebih baik. BUMDes diharapkan berperan memberikan kontribusi yang besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian maka adanya BUMDes mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga terciptalah suatu kesejahteraan sosial bagi masyarakat desa.



## **BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian pada hakekatnya merupakan suatu upaya menemukan kebenaran atau lebih membenarkan. Penelitian pada umumnya adalah untuk menentukan suatu generalisasi dan menjelaskan fenomena yang meliputi permasalahan dalam penelitian. Dalam suatu penelitian, untuk menjelaskan suatu fenomena dalam penelitian maka dibutuhkanlah metode penelitian. Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan sehingga peneliti dapat merumuskan, menjabarkan dan menganalisa data yang diperoleh yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian memegang peranan yang penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis adalah menggunakan pendekatan-pendekatan penelitian sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid. Dalam penelitian sosial terdapat dua jenis pendekatan untuk melakukan olah data yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pendekatan tersebut dipilih sesuai dengan fenomena yang sedang diteliti. Sebagaimana penjelasan di latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam kajian peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahwa pendekatan yang sesuai dalam kajian tersebut adalah penelitian kualitatif. Seperti yang di definisikan oleh Bugdan dan Taylor (dalam Moleong, 2001:3), bahwa:

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan tingkah laku yang diamati dari orang yang diteliti. Pendekatan ini diarahkan pada latar

dan individu secara holistik (utuh). Oleh karena itu, tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan”.

Metode kualitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti sebuah kondisi yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam yakni suatu data yang mengandung makna. Penelitian ini dikatakan kualitatif karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau menerangkan keadaan atau fenomena di lapangan berdasarkan data yang telah terkumpul yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisahkan-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajarkan untuk memperoleh kebenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan.

### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus (*case studies*). Jenis penelitian *case study* yaitu studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu. (Poerwandari, 2001:65) yang disebut:

“Kasus adalah fenomena khusus yang hadir dalam suatu konteks yang dibatasi, meski batasan fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas. Kasus dapat berupa individu, kelompok kecil, organisasi, komunitas atau bahkan bangsa.”

Dalam penelitian studi kasus peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan unit-unit sosial yang menjadi subjek. Seperti yang diungkapkan oleh (Maxfield, 1930:87) penelitian studi kasus adalah penelitian tentang status fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas subjek penelitian

dapat berupa individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Sehingga peneliti berminat meneliti tentang peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat desa khususnya peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. Sebab, BUMDes Al-Madina hanya satu-satunya yang terdapat di Kecamatan Bangorejo dan badan usaha yang memiliki khas tersendiri mulai dari program-program atau kegiatannya serta banyak menjadi contoh acuan dari BUMDes lainnya dan

### **3.3 Fokus Penelitian**

Menurut (Moleong, 2004:78), fokus penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan batas yang harus dilalui oleh seseorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa fokus penelitian berguna untuk membatasi suatu masalah, adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga dan teori-teori. Sehingga fokus penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam.

Adapun aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terkait dengan aktifitas pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan sasaran yaitu Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi.

### **3.4 Penentuan Lokasi Penelitian**

Dalam menentukan lokasi (Moleong, 2004:86) menyatakan cara terbaik ditempuh dengan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. Peneliti memilih lokasi ini dengan pertimbangan bahwa:

- (1) Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi

merupakan desa yang telah melaksanakan program BUMDes.

- (2) BUMDes di Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi merupakan BUMDes peraih juara satu di tingkat Provinsi Jawa Timur. (sumber: <http://www.kabarbanyuwangi.info/>).

Pemilihan lokasi tersebut cukup representatif dan lebih mudah dalam memperoleh data serta informasi untuk menunjang penelitian, sehingga dapat menggambarkan penelitian tentang peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat desa.

### 3.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif penentuan informan sangat diperlukan. Menurut (Moleong, 2000:90) menyatakan bahwa: informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang obyek penelitian bagi peneliti. Informan merupakan orang yang mengetahui tentang suatu kejadian atau peristiwa di lapangan dan terlibat langsung dalam kejadian itu sehingga apabila penulis bertanya tentang suatu keadaan, peristiwa atau kejadian maka penulis mendapatkan data yang valid. Informan disini nantinya sebagai obyek yang aktif memberikan jawaban terhadap apa yang ditanyakan penulis. Sehingga dalam hal ini penulis berusaha menggali informasi lebih dalam dari informan

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan informan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subyek lainnya. Peneliti ini menggunakan teknik *purposive* untuk informan pokok dan metode *Snowball Sampling* untuk informan tambahan. Menurut (Sugiyono, 2010:53-54), *purposive sampling* adalah:

“Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti”

Dalam penelitian ini, penulis menentukan informan pokok dengan menggunakan teknik *purposive sampling* karena peneliti memiliki kriteria-kriteria yang akan diteliti misalnya orang tersebut yang banyak mengetahui tentang BUMDes. Selanjutnya pembagian informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori berdasarkan fungsinya, yaitu:

1. Informan pokok (*primary informan*)

Pada penelitian ini penentuan informan pokok ini berfungsi sebagai aset sumber data utama, dalam penelitian ini menggunakan informan dengan mempertimbangkan suatu kejadian yang ditemukan dari subyek lainnya seperti Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2004:132). Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang yang paling banyak mengetahui dan terlibat langsung dalam kegiatan Badan Usaha milik Desa (BUMDes). Menurut Sugiyono (1997:47), informan kunci atau *key informan* harus dipenuhi 4 kriteria yang saling bertautan yaitu :

1. Subyek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan.
2. Subyek yang masih terlibat secara penuh atau aktif pada kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.
3. Subyek yang mempunyai banyak waktu atau kesempatan untuk diminta informasi.
4. Subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung dikemas terlebih dahulu.

Dari kategori tersebut maka dibutuhkan data dari Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Fuad Musyadad Kepala Desa Temurejo sebagai penasehat BUMDes
- b. H. Ali MAhsun ketua BUMDes Desa Temurejo
- c. Mujiono sebagai sekretaris BUMDes Desa Temurejo
- d. H. Imam Subandi sebagai bendahara BUMDes Desa Temurejo
- e. Suparman sebagai Pengawas BUMDes Desa Temurejo
- f. Suwarso sebagai kepala unit simpan pinjam

## 2. Informan tambahan

Menurut (Suyatno dan Sutinah, 2005:172), “Informasi tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti”. Informan tambahan biasanya orang yang dianggap tahu tentang segala kejadian (masih berhubungan dengan data pokok penelitian) yang dialami oleh informan pokok. Informan tambahan juga berfungsi untuk pengecekan ulang keabsahan data yang telah didapatkan dari informan pokok sebelumnya.

Untuk informan tambahan peneliti menggunakan metode *snowball sampling* karena peneliti masih samar tentang sample informan tambahan sehingga perlu *key informan* atau informan kunci untuk mengetahui informasi situasi dan kondisi yang ada dalam BUMDes. Menurut Neuman (2000:199) metode *Snowball* adalah sebuah metode untuk mengidentifikasi dan menyelidiki kasus yang berupa jaringan dengan menggunakan analogi bola salju. Sebelum peneliti melakukan proses wawancara pada informan tambahan peneliti harus mengetahui informan kunci.

Berdasarkan penjelasan Neuman diatas maka informan kunci yang dipilih dalam penelitian ini adalah Bapak Mujiono selaku pengurus BUMDes Desa Temurejo serta beliau yang selalu mendampingi peneliti dalam menggali segala informasi dan beliau merupakan orang yang banyak mengetahui tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes.

Adapun proses penentuan informan tambahan menggunakan metode *snowball sampling* yaitu sebagai berikut :

1. Orang pertama sebagai *key informan* yang banyak mengetahui tentang seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes yaitu Bapak Mujiono.
2. Dari hasil wawancara dengan Bapak Mujiono didapat keterangan bahwa ada anggota atau masyarakat lain yang mengetahui tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes yaitu sebagai berikut:
  - a. Subayan sebagai anggota BUMDes Desa Temurejo
  - b. Ali Sulthon sebagai anggota BUMDes Desa Temurejo
  - c. Sariyanto sebagai masyarakat Desa Temurejo

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting dari penelitian karena hakekat penelitian adalah pencarian data yang nantinya dianalisa dan diinterpretasikan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menghindari data-data yang buruk sehingga akan menghasilkan data yang objektif, valid dan reliabel. Berikut ini adalah langkah-langkah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu:

#### 3.6.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan pada suatu kejadian di lapangan, selanjutnya dari pengamatan tersebut dilakukan pencatatan secara sistematis terhadap gejala, data dan fakta yang diteliti secara langsung. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik observasi yang harus digunakan, (Sanafiah Faisal dalam Sugiyono, 2009:4) mengklarifikasi observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi secara terus terang dan tersamar (*overt observation dan covert observation*), dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi yang secara terus terang dan tersamar (*overt observation dan covert observation*) dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. Dalam jenis observasi terus terang ini peneliti menyatakan keterusterangannya kepada narasumber data terkait bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Akan tetapi dalam melakukan pengumpulan data, juga tidak harus berterus terang atau yang dimaksudkan adalah tidak menutup kemungkinan suatu saat melakukan observasi dengan tersamar untuk menghindari proses penyimpanan data secara rahasia yang dilakukan oleh sumber data. Kemungkinan kalau dilakukan secara terus terang peneliti tidak diizinkan untuk melakukan observasi terkait tentang segala bentuk kegiatan tentang pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BUMDes.

### 3.6.2 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden guna mendapat data dan keterangan yang menunjang penelitian. (Moleong, 2004:135) mengemukakan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu). Maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh (Lincoln dan Guba, 1985:266), antara lain yaitu:

“Mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (*triangulasi*); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota”.

Melalui metode wawancara ini peneliti akan mendapatkan data/ informasi secara mendalam, sehingga dapat memperoleh data lengkap hingga data jenuh. Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2011:233) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu:

- (a) Wawancara terstruktur yaitu Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dep interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, penelitti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.
- (b) Wawancara semitstruktur yaitu Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dep interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila



dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan dan,

- (c) Wawancara tidak terstruktur yaitu Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subyek yang diteliti. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada obyek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variable apa yang harus diteliti.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap para informan. Wawancara ini dilakukan dengan tidak terstruktur. Maksudnya adalah peneliti hanya menyusun pokok-pokok atau garis besar pertanyaan yang akan dilontarkan dan dijadikan pedoman dalam wawancara (*guide interview*). Selain itu juga melalui wawancara yang tidak terstruktur, informan dapat memberikan asumsi atau menafsirkan sesuatu seputar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes. Proses kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakukan di kantor BUMDes dan rumah informan, diharapkan data yang diperoleh semakin terfokus dan informan dapat menceritakan apakah yang sudah dilakukan BUMDes.

Dalam setiap wawancara peneliti selalu berusaha menghindari wawancara yang bersifat formal dan menciptakan suasana informal, alamiah (tetapi terkadang peneliti mencatat), dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada informan

untuk mengungkapkan secara luas tentang Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat desa.

### 3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dokumentasi merupakan pencatatan data yang bersumber dari arsip-arsip, surat-surat yang diperlukan dalam penelitian serta dokumen-dokumen atau data-data yang berhubungan dengan data penelitian yaitu data tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi diperoleh melalui arsip-arsip dari kantor Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, serta dokumen-dokumen lain yang relevan untuk menunjang dan menjelaskans proses penelitian ini seperti: segala aturan-aturan atau dasar hukum yang berkaitan tentang BUMDes, baik itu peraturan perundang-undangan, peraturan menteri dalam negeri serta peraturan desa. Selain itu data data dokumentasi berupa foto, catatan harian, dan hasil rekaman proses observasi dan wawancara dapat juga dijadikan sebagai salah satu dokumen penting yang mendukung penelitian ini.

### 3.7 Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan informan, baik secara tertulis maupun secara lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Bogdan (dalam Sugiyono. 2009:88), menyatakan bahwa analisis data adalah:

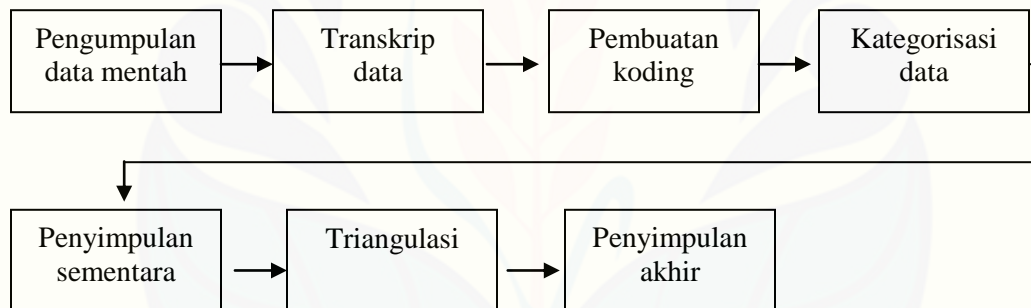
“Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikemukakan disini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut (Irawan, 2006:78-80) ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis data penelitian kualitatif, yaitu:

Gambar 3.1: Alur Analisis Data



Sumber: Irawan Prasetyo

### 1. Pengumpulan Data Mentah

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengumpulan data mentah, misalnya melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka,.Pada tahap ini menggunakan alat-alat yang perlu, seperti tape recorder, kamera dan lain-lain. Disini peneliti harus berhati-hati dan apa adanya.

### 2. Transkrip Data

Pada tahap ini, peneliti merubah catatan ke bentuk tertulis (baik yang berasal dari tape recorder atau catatan tulisan tangan). Semuanya diketik persis seperti apa adanya (*verbatim*) tanpa mencampuradukan dengan pendapat dan pikiran peneliti.

### 3. Pembuatan Koding

Pada tahap ini peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip. Pada bagian-bagian tertentu dan transkrip itu peneliti akan menemukan hal-hal penting yang perlu diambil kata kuncinya.

### 4. Kategorisasi Data

Pada tahap ini peneliti mulai “menyederhanakan” data dengan cara “mengikat” konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan kategori. Jadi, dari misalnya 75 kata-kata kunci peneliti mungkin akan merangkumnya menjadi misalnya 15 kategori. Taksonomi (penggolongan koding dan kategori menurut Bogdan & Biklen 1982 (dalam Irawan, 2006:77) menunjukkan beberapa kode, yaitu:

- a. Kode yang berhubungan dengan konteks/setting penelitian, disebut *setting / context codes*.
- b. Kode yang berhubungan dengan pendapat, pandangan yang dipegang (dipercayai oleh subjek penelitian), disebut *perspective codes*.
- c. Kode yang berhubungan dengan proses. Proses dilakukannya suatu kegiatan atau proses lainnya, disebut *process codes*.
- d. Kode aktifitas yang berhubungan dengan perilaku yang ditunjukkan para subjek, disebut *activity codes*.
- e. Kode yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi atau dialami subjek, disebut *event codes*.
- f. Kode yang berhubungan dengan cara-cara subjek mengerjakan sesuatu, disebut *strategy codes*.
- g. Kode yang berhubungan dengan pola hubungan/struktur hubungan antar subjek penelitian, disebut *relationship and social structure codes*.

- h. Kode yang berhubungan dengan metode penelitian yang dipakai oleh peneliti (kesulitannya, dilema-dilema kesukaran mencari data, dan sebagainya), disebut *methods codes*.
- i. Kode yang sudah ditentukan sebelum pengumpulan data (karena alasan tertentu, ada hal-hal yang “harus” diteliti), disebut *preassigned coding system*.

#### 5. Penyimpulan Sementara

Sampai disini peneliti boleh mengambil kesimpulan tapi masih sementara dan kesimpulan ini harus berdasarkan data. Jika peneliti ingin memberi penafsiran dari pikiran peneliti sendiri maka peneliti tulis pemikiran tersebut pada bagian akhir kesimpulan sementara ini. Pemikiran tersebut biasanya disebut *Observer's comments* (OC). OC adalah pendapat atau reaksi peneliti terhadap data di lapangan. Isi OC antara lain:

- a. Persetujuan anda terhadap apa yang dilakukan/dikatakan oleh subjek.
- b. Ketidaksetujuan peneliti
- c. Komentar peneliti yang menghubungkan data dengan teori
- d. Pertanyaan-pertanyaan baru, yang baru muncul setelah adanya data lapangan
- e. Perbandingan data dari satu informan dengan data dari informan lain.
- f. Peringatan untuk anda sendiri, misalnya untuk membaca buku tertentu untuk memahami data lapangan dari segi teori
- g. Hal-hal lain termasuk perasaan subjektif peneliti (senang, jengkel, geram, dan lain-lain).

#### 6. Triangulasi

Triangulasi adalah proses check dan recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi. Pertama, satu sumber cocok (senada, koheren) dengan sumber lain. Kedua, satu sumber data berbeda dari sumber lain tetapi tidak harus bertentangan. Ketiga, satu sumber 180% bertolak belakang dengan sumber lain.

### 7. Kesimpulan Akhir

Peneliti mengulangi langkah satu sampai langkah enam berkali-kali, sebelum peneliti mengambil kesimpulan akhir dan mengakhiri penelitian. Kesimpulan terakhir diambil ketika sudah merasa bahwa data peneliti sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan (*redundant*).

### 3.8 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian sosial yang secara metodologi menggunakan pendekatan kualitatif. Karena dalam penelitian yang bersifat empiris, informasi yang diberikan maupun perilaku masing-masing informan mempunyai makna sehingga tidak dapat langsung diterima begitu saja, oleh karena itu harus dilakukan pengujian keabsahan data untuk mengetahui kebenarannya.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif pendapat Patton dalam Moleong (2004:330). Untuk menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yangdikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitiandengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan sumber guna mengecek keabsahan data di lapangan. Langkah yang dilakukan yaitu mengakoparasikan hasil data yang diperoleh dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk meng*cross-check* dengan membandingkan pada sumber data yang lain serta membandingkan dengan analisis informan yang berseberangan. Dengan teknik ini penulis akan mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan pendapat dari para informan.

Peng*cross-check* hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di check oleh peneliti dengan Bapak Mujiono selaku informan pokok serta sekretaris dan pendamping peneliti selama menggali informasi penelitian di BUMDes Desa Temurejo karena beliau yang mengetahui tentang BUMDes yang ada di Desa Temurejo. Selanjutnya informan pokok lainnya yaitu pengurus BUMDes. Dari data yang didapat dari informan pokok tersebut di *cross-check* dengan informan tambahan yaitu anggota BUMDes dan masyarakat Desa Temurejo.